

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Saat ini degradasi dan kerusakan hutan dan lahan sudah menjadi isu yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhannya, hutan dan lahan terus mengalami degradasi. Degradasi hutan akibat perambahan lahan untuk berbagai keperluan dan aktivitas pembalakan liar mengakibatkan lahan pada situasi kritis. Lahan kritis pasti akan berdampak pada konservasi, produksi, dan fungsi sosial ekonomi hutan (Indrihastuti, 2016).

Jumlah deforestasi netto di Provinsi Jambi pada tahun 2019 hingga 2020, terdapat 4.035 hektar per tahun deforestasi pada kawasan hutan dan 451,9 hektar per tahun pada areal penggunaan lain/bukan kawasan (APL), sehingga total deforestasi mencapai 4.486,9 hektar per tahun. Kemudian pada tahun 2020 hingga 2021, terdapat 19.442,0 hektar per tahun angka deforestasi didalam Kawasan hutan dan 605,0 hektar per tahun pada areal penggunaan lain/bukan kawasan (APL), sehingga total deforestasi mencapai 20.047,0 hektar per tahun (BPS, 2022). Laju degradasi hutan ini cenderung semakin tinggi dikarenakan meningkatnya perubahan hutan menjadi lahan perkebunan, meningkatnya pembalakan liar, dan kebakaran hutan yang tidak terkendali (Rukminda *et al.*, 2020). Akibat adanya perubahan tata guna lahan, perlu adanya suatu kebijakan ataupun aturan yang bertujuan memulihkan kembali kondisi lingkungan kepada keadaan awalnya.

Upaya memulihkannya adalah membuka izin usaha restorasi sesuai dengan PP No.6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan namun dari 34 juta hektar hutan yang harus dipulihkan, baru 600.000 hektar yang mendapatkan izin usaha restorasi ekosistem dan saat ini dikelola oleh 16 perusahaan, dimana satu perusahaan tersebut adalah PT. Alam Bukit Tigapuluh. PT. Alam Bukit Tigapuluh telah diberikan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang meliputi dua blok terpisah dari hutan produksi negara seluas 38.655 hektar (Keputusan Kepala BKPM No:7/1/IUPHHK-HA/PMDN/2015) di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Restorasi Ekosistem PT. Alam Bukit Tigapuluh terbit untuk

mengelola kawasan seluas 38.665 ha yang terbagi menjadi dua blok, blok I seluas 22.095 ha dan blok II seluas 16.570 ha selama 60 tahun. Kawasan yang dikelola PT. ABT merupakan zona penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan bagian penting ekosistem Bukit Tigapuluh.

Kawasan penyangga adalah suatu wilayah yang berada di antara kawasan konservasi dengan wilayah budidaya atau wilayah pemukiman, yang dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu melindungi kawasan konservasi dan sumberdaya yang ada di dalamnya terhadap gangguan dari kawasan di luarnya, serta untuk melindungi kawasan budidaya atau pemukiman terhadap gangguan yang mungkin terjadi dari kawasan konservasi. Listyarini *et al.*, 2011 menyatakan bahwa, zona penyangga mengelilingi dan berbatasan langsung dengan kawasan hutan, sehingga membatasi aktivitas manusia di dalam kawasan hutan agar tidak merusak ekosistem yang ada di dalam kawasan hutan. Pemanfaatan kawasan hutan dengan cara memberikan akses kelola secara legal kepada masyarakat asli maupun masyarakat pendatang merupakan salah satu program strategi nasional yang dikembangkan sejak tahun 2016 yaitu Perhutanan Sosial (PS) dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Menurut PERMEN LHK No. 09 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, perhutanan sosial dilakukan pada kawasan hutan nasional atau hutan hak/hutan adat untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan hidup, dan budaya dinamika sosial dilaksanakan dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Masyarakat, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Salah satu kebijakan skema perhutanan sosial yaitu kemitraan kehutanan sebagai upaya pemerintah bagi masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan serta mengelola hutan secara legal.

Persetujuan mengenai pengelolaan kemitraan hutan dapat diberikan kepada salah satunya yaitu kelompok tani hutan, oleh karena itu munculah program kemitraan konservasi melalui kelompok tani hutan yang ada di PT. Alam Bukit Tigapuluh, dimana kelompok tani tersebut seperti kelompok tani hutan Wonolestari dan kelompok tani hutan Alam Bukit Sejahtera dengan bentuk kegiatan yang direncanakan adalah program agroforestri. Agroforestri adalah suatu pola penggunaan lahan yang menanam berbagai jenis tanaman tahunan bersama dengan

tanaman semusim dan hewan ternak pada lahan yang sama untuk meningkatkan pendapatan sekaligus menjaga lingkungan (Hairiah dan Ashari, 2013). Agroforestri merupakan salah satu bentuk terpenting dari penerapan konsep perhutanan sosial dan dalam penerapannya memiliki beragam karakteristik yang berbeda bila ditinjau dari segi fungsinya, terdapat fungsi yang berdasarkan aspek sosial-ekonomi, berdasarkan aspek sosial-budaya, serta berdasarkan aspek ekologi. Pada umumnya karakteristik yang tercermin dalam pengelolaan lahan berbasis agroforestri oleh masyarakat lebih cenderung menunjukkan aspek pengelolaan yang menitikberatkan pada aspek sosial-ekonomi. Pengelolaan agroforestri yang didasarkan pada aspek peningkatan sosial-ekonomi semata, dapat terlihat dengan komposisi jenis pada setiap pola agroforestri yang diterapkan oleh masyarakat pada lahannya, pada umumnya komposisi jenis yang terdapat pada lahan masyarakat dipengaruhi langsung oleh luas kepemilikan lahan oleh masyarakat yang menggarap lahannya. Karena anggota kelompok tani hutan berpartisipasi dalam program agroforestri ini, maka keberhasilannya sangat bergantung pada bagaimana cara mereka memandang (persepsi) dan melakukan (partisipasi), maka perlu diketahui bagaimana persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan agroforestry (Anna *et al.*, 2024).

Menurut Wulandari (2010) persepsi adalah proses dimana seseorang menyadari suatu objek yang dirangsang oleh panca indera. Persepsi seseorang terhadap suatu kegiatan dapat mempengaruhi partisipasinya dalam kegiatan tersebut dan keikutsertaan dalam suatu kegiatan oleh suatu masyarakat disebut partisipasi. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan adanya perbedaan hubungan antara persepsi masyarakat dengan partisipasi dalam pengelolaan hutan. Seperti pada penelitian Hudiyani I *et al.*, (2017), menyatakan keberhasilan pembangunan hutan rakyat pola agroforestri di Kabupaten Wonogori tidak terlepas dari persepsi petani mengenai hutan rakyat pola agroforestri. Sedangkan pada penelitian Purnomo *et al.*, (2017) menemukan tidak adanya hubungan antara kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan di KPHP Model Unit VII Hulu Salorangun. Secara keseluruhan dapat dikatakan partisipasi responden berada pada tingkatan yang rendah. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi yaitu karakteristik individu seperti pendidikan,

pendapatan, jumlah tanggungan, persepsi terhadap kondisi hutan dan persepsi mengenai pengelolaan yang dilakukan oleh KPHP.

Berdasarkan penelitian “Hubungan Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pola Agroforestri di Wilayah KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XVI” Nisa, K. (2022), menyatakan persepsi tidak sepenuhnya mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terhadap pola agroforestri di wilayah KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XVI. Sedangkan hasil penelitian Suhesti dan Hadinoto (2019) menyatakan terdapat hubungan antara persepsi dan partisipasi, yaitu terbukti partisipasi masyarakat dalam penerapan agroforestri dipengaruhi oleh persepsi masyarakat itu sendiri. Persepsi yang baik dan partisipasi yang tinggi menjadi indikator bahwa masyarakat mendukung penerapan agroforestri, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai **“Persepsi dan Partisipasi Anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam Pelaksanaan Agroforestri di Areal Kemitraan PT. Alam Bukit Tigapuluh Provinsi Jambi”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi bagian penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana persepsi anggota kelompok tani hutan dalam pelaksanaan agroforestri di areal kemitraan PT. Alam Bukit Tigapuluh?
2. Bagaimana partisipasi anggota kelompok tani hutan dalam pelaksanaan agroforestri di areal kemitraan PT. Alam Bukit Tigapuluh?
3. Bagaimana hubungan antara persepsi dan partisipasi anggota kelompok tani hutan dalam pelaksanaan agroforestri di areal kemitraan PT. Alam Bukit Tigapuluh.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis persepsi anggota kelompok tani hutan dalam pelaksanaan agroforestri di areal kemitraan PT. Alam Bukit Tigapuluh.
2. Menganalisis partisipasi anggota kelompok tani hutan dalam pelaksanaan agroforestri di areal kemitraan PT. Alam Bukit Tigapuluh.

3. Menganalisis hubungan persepsi anggota kelompok tani hutan terhadap partisipasi dalam pelaksanaan agroforestri di areal kemitraan PT. Alam Bukit Tigapuluh.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait pengaruh persepsi anggota kelompok tani hutan terhadap pelaksanaan agroforestri di areal kemitraan PT. Alam Bukit Tigapuluh dan sebagai sumber referensi dan informasi bagi pihak yang berkepentingan.